

ABSTRAK

Surat keterangan waris selain sebagai surat bukti ahli waris tetapi juga menjadi alas hak dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Didasari pada Permen ATR BPN Nasional Nomor 16 Tahun 2021, penerbitan surat keterangan waris dapat dilakukan di Notaris, Balai Harta Peninggalan, Lurah beserta camat, serta lembaga peradilan. Lurah sebagai pejabat tata usaha negara dianggap rancu apabila melakukan penerbitan surat keterangan waris yang dalam ranah hukum perdata.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan lurah dalam penerbitan surat keterangan waris sebagai alas hak dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dan menganalisis efektivitas surat keterangan waris yang diketahui oleh kelurahan sebagai alas hak dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder, teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menitikberatkan pada kedalaman data bukan banyaknya data melalui pemahaman dan penemuan.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan mengacu pada Permen ATR BPN Nomor 16 Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, surat keterangan waris yang diketahui oleh lurah serta camat dapat digunakan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan serta mempunyai kedudukan yang sama dengan surat keterangan waris dari instansi lainnya, dalam pelaksanaannya berjalan cukup efektif, walaupun tidak ada kewenangan atributif yang menunjuk lurah serta camat untuk kewenangan penerbitan surat keterangan waris. Kewenangan kelurahan dalam penerbitan surat keterangan waris sebagai alas hak pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah lurah sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas administrasi negara dan pelayanan masyarakat adalah kewenangan dalam bentuk *freis ermessen*. Kewenangan ini diberikan oleh pejabat tata usaha negara sebagai pelengkap asas legalitas yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Efektivitas, Surat Keterangan waris, Peralihan Hak Atas Tanah

ABSTRACT

Inheritance certificate is not only a proof of heirs but also a right base in the registration of transfer of land rights due to inheritance. The issuance of the National Land Agency Regulation Number 16 of 2021, in the issuance of inheritance certificates is carried out at the Notary, the Heritage Center, the Head of Village and sub-district heads, and judicial institutions. The Head of Village as a state administrative official is considered ambiguous when issuing inheritance certificates in the realm of civil law.

Based on the above background, the purpose of this study is to determine the authority of the village head in issuing a certificate of inheritance as the basis of rights in the registration of transfer of land rights and to analyze the effectiveness of the certificate of inheritance known by the village as the basis of rights in the registration of transfer of land rights..

The research method used is the juridical-empirical method, the types of data used are primary data and secondary data, data collection techniques with primary data collection obtained from the field and secondary data, technical data analysis used is descriptive qualitative emphasizing on the depth of data not the amount of data through understanding and discovery.

The results of the research and discussion state that referring to the National Land Agency Regulation Number Number 16 of 2021 and the provisions of Article 42 of PP Number 24 of 1997 concerning land registration, a certificate of inheritance known by the village head and sub-district head can be used to register the transfer of land rights due to inheritance and has the same position as a certificate of inheritance from other agencies, in its implementation it runs quite effectively, although there is no attributive authority that appoints the village head and sub-district head for the authority to issue a certificate of inheritance. The authority of the head of village in issuing inheritance certificates as the basis for registering the transfer of land rights is the head of village as a state administrative official who carries out state administrative duties and public services is authority in the form of *freis ermissen*. This authority is granted by state administrative officials as a complement to the principle of legality aimed at the public interest and does not conflict with the applicable legal system.

Keywords: Effectiveness, Certificate of Inheritance, Transfer of Land Right